PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2017

Hal.: 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

HUMASPROV

**TERIMA PIAGAM**: Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis (kanan) saat menerima penghargaan dari BPK atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemarin di Gedung DPRD Kalbar.

# Pemprov Lima Kali Raih WTP

## Cornelis: Murni Kerja Keras Bersama

**PONTIANAK**— Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Ini merupakan WTP yang kelima kalinya diraih pemprov.

Hal tersebut disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VII RI Abdul Latief saat sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/6).

◆Ke Halaman 7 kolom 5

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2017

Hal.: 7

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

# Pemprov Lima Kali Raih WTP

***Sambungan dari halaman 1***

Sidang yang berlangsung itu dipimpin Ketua DPRD Kalbar M. Kebing L. Hadir dalam Sidang Paripurna Gubernur Kalbar Cornelis, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, dan Sekretaris Daerah Kalbar M. Zeet Hamdy Assovie, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD dan undangan lainnya.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan predikat yang diraih itu merupakan hasil kerja keras bersama. "Ini menjadi komitmen kuat dari Pemprov dalam memberikan laporan keuangan yang sesuai standar yang diberlakukan. Tetapi ini juga berkat kerja keras dan sinergi bersama dengan semua pemangku kepentingan. Termasuk pengawasan dan dukungan dari DPRD Kalbar," ujar Cornelis.

Auditor Utama Keuangan Negara VII RI Abdul Latief menyebutkan ada tiga laporan utama yang diserahkan, yakni LHP atas LKPD tahun 2016, LHP atas sistem pengendalian intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2016 disusun berdasarkan standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari tujuh laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Abdul menilai pencapaian opini WTP untuk kelima kalinya bagi Pemprov Kalbar sebagai gambaran kuat akan komitmen Pemprov Kalbar dan SKPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kendati demikian, ia menegaskan BPK tetap memberikan catatan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Pemprov Kalbar. Catatan itu di antaranya pengelolaan persediaan pada UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi belum memadai.

Lalu pengelolaan aset tetap Pemprov Kalbar juga kurang memadai. Kemudian untuk laporan dana BOS, dimana Tim Manajemen Bos Provinsi belum menyampaikan laporan kepada tim manajemen BOS Pusat.

Selanjutnya pada pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, ada sebesar Rp22 juta yang tidak sesuai dengan peraturan daerah retribusi jasa usaha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Kebing L kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa opini WTP untuk kelima kalinya bukanlah sesuatu yang luar biasa. "WTP harusnya menjadi panduan dalam membeikan semangatuntuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara. Paling tidak terus memperbaiki kinerja di masa akan datang," ujarnya.

Walaupun memperoleh WTP lima kali berturut-turut, bukannya DPRD Kalbar tanpa kritik. Misalnya, penyelesaian masalah aset pemprov dan perbaikan dunia pendidikan di Kalbar harus terus memperoleh tempat. "Artinya, secara bersama-sama mampu bekerja keras untuk memperbaiki kinerja soal aset dan pendidikan ini," katanya.

Ia melanjutkan bahwa masalah aset dan pendidikan bukan hanya tanggung jawab semata-mata Gubernur Kalbar dan jajaran. Kalangan DPRD Kalbar sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah akan terus mengingatkan. "Yang pasti memang mempertahankan opini WTP justru lebih sulit tetapi tetap menjadi acuan dalam bekerja," tukas dia.

Terkait tertangkap tangannya pegawai BPK RI terkait jual beli opini WTP di Kementriaan Daerah Tertinggal di Pusat belum lama ini, Kebing menanggapi dengan santai. "Kami tak pahamlah jual beli opini WTP. Kejadian tersebut berada di pusat, bukannya di daerah. Kami tak berani menanggapi dan berbuat lebih jauh," ujarnya. ***(den/mse)***